

EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:
DALENA SUMI
NIM. E42012050

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : dalenasumi@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el belum berjalan dengan efektif melalui kriteria efektivitas organisasi yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi menurut Emitai Etzioni. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan perekaman belum efektif dikarenakan kebijakan jempot bola yang belum efektif, sosialisasi yang kurang, jaringan (Telkom berbasis VPN) yang sering mengalami gangguan, gedung yang terlalu sempit, dan anggaran yang kurang, target perekaman KTP-el di setiap Kecamatan belum ditentukan mengingat pertumbuhan penduduk selalu meningkat.

Kata-kata Kunci: Efektivitas Organisasi, KTP-el, Efektif.

THE EFFECTIVITY OF GOVERNMENT ORGANIZATION IN IMPLEMENTATING ELECTRONIC INDONESIAN IDENTITY CARD (E-ID CARD) AT PAPANULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY OF BENGKAYANG REGENCY

ABSTRACT

This writing aimed to identify the factors that cause the implementation of electronic Indonesian Identity Card Making goes bad at Population and Civil Registration Agency of Bengkayang Regency through several criteria consist of adaptation, integration, motivation and production according to Emitai Etzioni's theory. The type of this research is an descriptive study with qualitative method.

The conclusion is the implementation of e-ID card making goes bad because of the policy related with visiting population done by the agents still not effective, lack of socialization, network (Telcom based on VPN) often get error, building is narrow and lack of budget, the target of e-ID card recording in every sub district still not determined because increasing of population growth.

Keywords : Organization Effectivity, e-ID card, Effective.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah terlepas dari peran para aparatur negara sebagai pelaksananya. Aparatur Negara yang dimaksud ialah pegawai negeri yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan setiap hari. Aparatur Negara tersebut tentunya yang memiliki kompetensi, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara atau abdi masyarakat yang harus melayani masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Sehubungan dengan keberadaan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, organisasi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yakni sebagai wadah bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Organisasi tidak lain adalah untuk mencapai beberapa sasaran yang ditetapkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Suatu organisasi dalam mencapai efektivitas suatu organisasi adalah dengan pencapaian sasaran dari upaya bersama antar aparatur dalam organisasi tersebut. Salah satu

upaya adalah dengan mematuhi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kebijakan pemerintah dalam Administrasi Kependudukan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara wajib melakukan pendaftaran penduduk yang merupakan kegiatan penelitian dan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian,

perpindahan, kedatangan, perubahan status kependudukan dan mutasi data. Bentuk keluaran dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 pasal 63 ayat 1 : *“Setiap warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”*.

KTP-el yang merupakan singkatan dari KTP-Elektronik pada awalnya menggunakan istilah e-KTP yang merupakan singkatan dari Electronic KTP, seiring dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2013, semua singkatan “KTP” harus dimaknai dengan “KTP-el”, dengan alasan mengacu pada Ejaan yang Disesuaikan (EYD) dalam pembendaharaan bahasa Indonesia. Selain itu, masa waktu KTP tersebut yang sebelumnya hanya lima tahun, menjadi seumur hidup.

KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap Penduduk dan berlaku seumur hidup.

Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten yang baru berkembang dan membutuhkan pelaksanaan perekaman KTP-el yang cepat, tepat dan akurat sesuai dengan motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Pelayanan KTP-el merupakan salah satu pelayanan pendaftaran penduduk yang mempunyai tujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan, untuk memperoleh data kependudukan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari pendaftaran penduduk adalah ditertibkannya bukti identitas sebagai penduduk yang sah yang merupakan dasar untuk mengurus berbagai kepentingan bagi penduduk yang bersangkutan.

Dalam orientasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti ketika melaksanakan Praktek Pengalaman kerja (PPK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang terlihat bahwa pelaksanaan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) masih belum efektif. Dari hasil data perekaman KTP-el di Kabupaten Bengkayang sampai dengan bulan Juni 2016, pelaksanaan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang belum bisa mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Dari data perekaman baru 133.504 warga yang melaksanakan perekaman dari 189.905 warga wajib KTP.

Dengan demikian masih ada masyarakat yang belum memiliki KTP-el, salah satu masalah yang ditemukan peneliti pada waktu Praktek Pengalaman Kerja (PPK) yaitu masyarakat belum melakukan perekaman dengan alasan sakit dan lansia sehingga masyarakat tersebut belum memiliki KTP Elektronik. Sedangkan Perda No. 5 tahun 2008 pasal 28 tentang administrasi kependudukan menyatakan: *“Penduduk yang tidak mampu*

melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain”.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah “Mengapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) belum efektif?”.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab belum efektifnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan perekaman KTP-el.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan

khususnya di bidang ilmu pemerintahan dalam lingkup manajemen pemerintahan sehingga dapat membantu memperkaya konsep serta teori dalam mempelajari ilmu pemerintahan dan bisa menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan peneliti lainnya yang sekiranya akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el.
- 2) Menjadi referensi untuk menyusun kebijakan berkaitan dengan efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan perekaman KTP-el sehingga kedepannya target perekaman KTP-el bisa tercapai.

Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:227), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya Model Sistem (*System Model*), yang menyangkut empat kriteria, yaitu :

- 1) Adaptasi. Kriteria adaptasi dipersoalkan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini terkait dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk menyesuaikan program KTP-el yang dirumuskan untuk memecahkan masalah yang muncul, seperti kendala dalam perekaman untuk menunjang tercapainya pelayanan publik yang diharapkan.
- 2) Integrasi. Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Yaitu bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang mampu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KTP-el.
- 3) Motivasi. Motivasi dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Yaitu bagaimana tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Serta kenyamanan bekerja pegawai yang dapat mempengaruhi hasil kerja yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini menurut Danim (2012:30) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu : a) gaya kepemimpinan administrasi. Kepemimpinan dengan gaya otoriter membuat pekerja menjadi tertekan dan tak acuh dalam bekerja. Maka dari itu gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi kerja pegawai. b) sikap individu. Ada individu yang statis dan ada pula individu yang dinamis. Demikian juga, ada individu yang bermotivasi kerja tinggi dan ada pula yang bermotivasi kerja rendah. Situasi dan kondisi di luar diri individu member pengaruh terhadap motivasi. Akan tetapi yang paling menentukan adalah individu itu sendiri. c) situasi kerja. Lingkungan kerja, jarak tempuh dan fasilitas

yang tersedia membangkitkan motivasi, jika persyaratan terpenuhi.

- 4) Produksi. Usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab belum efektifnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan perekaman KTP-el yang kemudian akan peneliti bahas dengan menggunakan teori Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:227), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya Model Sistem (*System Model*).

1) Adaptasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Adaptasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian organisasi yang

efektif. Adaptasi suatu organisasi juga menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila organisasi tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dianggap salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terutama yang berkaitan dengan terciptanya organisasi yang efektif.

Kondisi geografis daerah Kabupaten Bengkayang menunjukkan adanya kecamatan yang kondisi geografis/daerahnya dengan jarak tempuh yang jauh dari ibukota Kabupaten Bengkayang salah satunya Kecamatan Siding dan dari observasi yang peneliti lakukan di Kabupaten Bengkayang masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el, salah satunya dikarenakan sakit dan lansia. Selain itu sikap tidak ramah dan suka menunda-nunda pekerjaan juga dirasakan oleh masyarakat pada organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Hal ini menjadi

sebuah masalah karena masyarakat yang kondisi geografis/daerahnya dengan jarak tempuh yang jauh dari ibukota Kabupaten Bengkayang untuk melakukan perekaman yang harus dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang akan memerlukan biaya yang besar dan jarak tempuh yang lama karena sulit dijangkau transformasi umum dan dengan pelayanan yang tidak ramah dan suka menunda-nunda pekerjaan itu juga akan mendapat penilaian organisasi yang kurang efektif. Dengan masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el dan pelayanan yang tidak ramah dan sikap yang suka menunda-nunda pekerjaan, maka pencapaian target perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhambat.

Adaptasi yang diterapkan dalam pelaksanaan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sudah dilakukan. Salah satu langkah adaptasi yang dilakukan adalah dengan memberikan surat edaran kepada semua Camat dan Kepala Desa untuk melakukan penunjukan tenaga teknis pelayanan KTP-el,

mempermudah persyaratan khususnya untuk proses perekaman KTP-el, dan pendataan masyarakat yang belum maupun yang sudah melakukan perekaman KTP-el serta mendatangi kecamatan/desa langsung untuk melakukan perekaman (jemput bola). Penunjukan tenaga teknis pelayanan KTP-el dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penerapan KTP-el, mempermudah persyaratan khususnya untuk proses perekaman KTP-el yaitu cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga saja dan jemput bola ini dilakukan agar pelaksanaan perekaman KTP-el yang kondisi geografis/daerahnya dengan jarak tempuh yang jauh dipermudah.

2) **Integrasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

Integrasi merupakan faktor penting dalam proses pencapaian tujuan dari kebijakan, karena pada dasarnya suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada penyampaian langsung dari pihak pelaksana kebijakan kepada konsumen tentang kebijakan yang

akan dilaksanakan, jika integrasi tidak berjalan maka pencapaian tujuan dari suatu kebijakan akan terhambat. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dari hasil penelitian sosialisasi memang sudah dilakukan, hanya saja masyarakat merasakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang masih kurang karena dengan adanya masyarakat yang masih belum mengetahui pelaksanaan perekaman KTP-el, masyarakat belum menyadari pentingnya KTP-el. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el maupun yang belum melakukan perekaman KTP-el, dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang perekaman KTP-el maupun tentang kebijakan jemput bola (Mobile Enrollment).

3) **Motivasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Perekaman Kartu**

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam proses pencapaian organisasi yang efektif, karena pada dasarnya organisasi tidak bisa berjalan dengan efektif jika motivasi dalam organisasi tidak memadai. Motivasi yang mendukung suatu organisasi itu lebih efektif adalah anggaran, hubungan antar pelaku organisasi dengan organisasinya baik internal maupun eksternal serta kelengkapan sarana dan prasarana. Motivasi terhadap organisasi yaitu bagaimana tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, kenyamanan bekerja pegawai yang dapat mempengaruhi hasil kerja, dan anggaran yang mendukung untuk terlaksananya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, peneliti melihat bahwa motivasi masih menjadi kendala. Hal tersebut terlihat dari sarana yang kurang memadai seperti sering terjadinya gangguan jaringan (Telkom berbasis

VPN), gedung yang terlalu sempit dan anggaran yang kurang.

Pada dasarnya motivasi sangat berperan penting dalam penyelenggaraan perekaman KTP-el karena, jika dilihat dari pernyataan di atas bahwa memang motivasi dalam organisasi seperti, hubungan antar pelaku organisasi dengan organisasinya baik internal maupun eksternal, kelengkapan sarana dan prasarana serta anggaran sangat mempengaruhi dalam pencapaian organisasi yang efektif.

4) Produksi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:227), mengungkapkan kriteria keempat mengenai pengukuran Efektivitas organisasi yaitu produksi. Produksi merupakan usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi. Organisasi yang efektif adalah dengan kemampuan organisasi tersebut untuk mencapai output/pencapaian target yang sudah ditetapkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:227), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya Model Sistem (*System Model*), yang menyangkut empat kriteria, yaitu : Adaptasi, Integrasi, Motivasi, dan Produksi. Dari hasil penelitian serta uraian pembahasan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam mencapai organisasi yang efektif sangat diperlukan adaptasi yang baik untuk suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan karena adaptasi berbicara tentang kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi suatu organisasi juga menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el sudah menyelenggarakan kemampuan

suatu organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya salah satunya dengan kebijakan jempot bola, hanya saja masih belum efektif.

- 2) Pada kriteria integrasi untuk pencapaian organisasi yang efektif dalam pelaksanaan perekaman KTP-el ditemui adanya masalah dalam pelaksanaan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang diantaranya ialah sosialisasi yang kurang.
- 3) Pada kriteria motivasi yang mana merupakan kriteria ketiga dalam efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Emitai Etzioni. Motivasi yang ada di organisasi merupakan salah satu unsur yang mendukung pencapaian organisasi yang efektif dalam pelaksanaan perekaman KTP-el. Motivasi terhadap organisasi yaitu bagaimana tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, kenyamanan bekerja pegawai yang dapat mempengaruhi hasil kerja, dan anggaran yang mendukung untuk terlaksananya

suatu kebijakan. Pada kriteria motivasi untuk mencapai organisasi yang efektif dalam pelaksanaan perekaman KTP-el ditemui beberapa masalah dalam pelaksanaan perekaman KTP-el yaitu pada jaringan (Telkom berbasis VPN) yang sering mengalami gangguan, gedung yang terlalu sempit, dan anggaran yang kurang. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang belum bisa efektif dalam pencapaian pelaksanaan perekaman KTP-el.

- 4) Organisasi yang efektif adalah dengan mampunya organisasi tersebut untuk mencapai output/pencapaian target yang sudah ditetapkan. Pada kriteria produksi dimana pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang masih belum mencapai target yang diharapkan karena target perekaman KTP-el di setiap Kecamatan belum ditentukan

mengingat pertumbuhan penduduk selalu meningkat.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang disampaikan peneliti, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar dapat mencapai peningkatan pelaksanaan perekaman KTP-el. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

- 1) Perlu dilakukannya adaptasi seperti kebijakan jemput bola tersebut tidak hanya di fokuskan untuk daerah pedalaman melainkan di setiap kecamatan yang masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman karena sakit dan lansia melalui pendataan dari setiap RT, pendataan yang dilakukan baik yang sudah maupun yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk segera dilakukan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dengan penunjukan tenaga teknis di lapangan sebaiknya perekaman dilakukan di setiap desa sesuai

dengan yang diharapkan masyarakat.

- 2) Perlu adanya koordinasi antara Disdukcapil, Kecamatan dan Desa untuk dilakukannya sosialisasi mengenai KTP-el di setiap Desa dengan mengatur jadwal kunjungan dan dilakukan selama 3(tiga) kali dalam setahun agar masyarakat lebih memahami serta mengetahui mengenai KTP-el.
- 3) Perlu dilakukannya koordinasi antara pihak capil dengan pihak pusat untuk menangani masalah jaringan yang sering mengalami gangguan, melakukan koordinasi dengan organisasi lainnya mengenai anggaran dan bangunan yang terlalu sempit.
- 4) Disdukcapil harus mempunyai target dalam bentuk angka untuk pencapaian perekaman di setiap Kecamatan pertahunnya, mengingat pertumbuhan penduduk akan selalu ada. Maka dari itu akan ada penilaian yang dapat diukur mengenai pencapaian produksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

1. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian mengenai Efektivitas Organisasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tentu ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Kesulitan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dikarenakan pengelolaan kearsipan dokumen yang masih kurang baik
2. Keterbatasan peneliti dalam merangkai kalimat yang baik dan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar sehingga untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan cukup menyulitkan penulisan penelitian.

F. REFERENSI

Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agus Purwanto, Erwan, Ph.D dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Indrawijaya, Adam I. 2000. *Perilaku Organisasi Bandung*. Sinar Baru. Algasindo

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prodi IP, Fisip Untan. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Universitas Untan.

Siagian, Sondang. 2001. *Motivasi dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara

Subkhi, Akhmad, M.M. dkk. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 5 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Skripsi:

Oktiwi, Via. 2013. *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi*. Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.

Sindy, Joan Ria. 2014. *Implementasi Program kartu tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.

Rujukan Peraturan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Telematika Di Indonesia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dalena Sumi
NIM / Periode Lulus : E42012050 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Sumidalena@gmail.com / 089666275051

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Oktober 2016




(Dalena Sumi)